

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung  
(Studi Kasus Di Kampung Aingogin Kecamatan Tembapapura Kabupaten  
Mimika)**

**Freedy Beanal<sup>1</sup>**

**Novie R. Pioh<sup>2</sup>**

**Welly Waworundeng<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengambarkan peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kampung Aingogin Kecamatan Tembapapura Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dengan jenis penelitian ini maka dapat digambarkan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Aingogin Kecamatan Tembapapura Kabupaten Mimika. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi Parsipatif, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah kampung Ainggogin dalam hal ini kepala kampung dan perangkatnya dalam urusan pemerintahan sudah dijalankan sesuai dengan yang diharapkan sedangkan peran pemerintah kampung dalam urusan pembangunan dan kemasyarakatan yang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses program pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan terkesan kurang baik sehingga berimplikasi pada tingkat kepuasan dan harapan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Ainggogin belum dilakukan secara baik dan terencana dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan dan sampai pada tahap evaluasi.

***Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Kampung***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## **Pendahuluan**

Pada umumnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan keterlibatan masyarakat untuk menunjang jalannya program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan bahkan pemeliharaan hasil pembangunan. Dalam setiap pengambilan keputusan untuk membicarakan program-program pembangunan desa bahkan sampai pada pelaksanaan program pembangunan hampir semuanya harus ada keterlibatan masyarakat yang adalah aktor-aktor dalam setiap pengambilan keputusan untuk program pembangunan desa, sebab masyarakatlah yang merashkan dampak dari kebijakan pembangunan desa. Dan ini juga adalah sebuah perhatian atau kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat dan bagian ari pemberdayaan masyarakat desa untuk teribat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan di desa.

Landasan pemikiran dan peraturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Subsidi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal inilah menjadi landasar pemikiran dari Pemerintahan Desa yang ada di desa Aingoin untuk terus membedakan masyarakat desanya dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan desa yang dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan bahkan pada tahap evaluasi pembangunan desa.

Desa Aingogin adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tembapapura Kabupaten Mimika dengan kondisi geografis terletak diantara dua sungai yang disebelah selatan yakni Kali Butala Nogoung dan disebelah Barat Kali Tenogoung dari kondisi geografis desa Aingoin maka pemerintah desa saat ini terus giat merencanakan program pembangunan fisik diantaranya; jalan antar desa, jembatan penghubung antar desa, kantor desa dan talud dikedua sungai yakni kali Butala Nogoung dan Kali Tenogoung.

Partisipasi masyarakat desa Aingogin selama ini adalah partisipasi dalam pembangunan fisik dan selama ini masih dikatakan cukup aktif hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang giat dalam kegiatan bhakti sosial seperti program cabut rumput yang sudah biasanya dilakukan oleh masyarakat dan program lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik hal ini juga dipengaruhi oleh adat dan budaya orang Papua pada umumnya yang suka hidup bergotong royong saling membantu satu sama lain.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Teori**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait Bab IX Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan pragraf 1 pasal (80) ayat 1 menjelaskan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dalam 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Selanjutnya dalam pasal (81) ayat 5

masayarakat desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut FAO (1989) menjelaskan beberapa pengertian partisipasi diantaranya; Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

Partisipasi adalah 'pemekaan' pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menrima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; partisipasi adalah suatu proyek aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakannya dan melakukan hal itu;

Ada 3 hal penting dalam Partisipasi diantaranya

1. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional bukan daripada sekedar aktivitas otot, makudnya keterlibatan menyeluruh seseorang, tidak sekedar keterampilannya.
2. Partisipasi adalah partisipasi memotivasi orang berkontribusi mereka diberdayakan untuk membesakan sumber daya inisiatifnya dan kreativitasnya untuk dalam tujuan organisasi.

Bila dilihat dari bentuk dan tahapan partisipasi, maka tahapan partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Hoofsteede (1971: 25), dalam hal ini membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, antara lain :

- a. Partisipasi inisiasi (*Inisiation Participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai

suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

- b. Partisipasi Legitimasi (*Legitimation Participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.

Partisipasi Eksekusi (*Execution Participation*), adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Pengertian Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019: 520). Dengan Jenis penelitian Kualitatif ini maka dapat digambarkan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika. Penentuan lokasi dalam penelitian ini adalah di di desa Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan di desa Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika, Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh prosers pembangunan desa di desa Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri namun selanjutnya setelah fokus

penelitian menjadi jelas maka kemungkinan dikembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. maka dalam penelitian ini yang menjadi informan untuk dapat memberikan keterangan atau informasi dengan jelas dan benar adalah; Kepala Kampung:1 orang Sekretaris Kampung: 1 orang Pelaksana Teknis lapangan : 4 orang, Unsur Kewilayahan : 1 orang, Tokoh Agama : 1 orang, Tokoh Adat : 1 Orang 1 Masyarakat umums: 3 Orang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. aktivitas dalam analisis data adalah.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai informan dalam penelitian ini yaitu:

#### **Hasil Wawancara Bersama Pemerintah Desa**

Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari bapak sebagai pemerintah kampung Ainggongin? dengan indikator peran pemerintah kampung dalam urusan pemerintahan, didapatkan jawaban sebagai berikut:

“Menurut UU 32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005, selaku kampung saya mempunyai tugas yaitu, untuk menjalankan roda pemerintahan dikampung, meningkatkan pembangunan kampung yang ada, dan membina kehidupan masyarakat yang ada ini dengan adat yang ada secara turun temurun”.

Melihat peran dari pemerintah kampung dalam urusan pemerintahan sangatlah penting maka peneliti

melakukan wawancara kepada informan AB selaku kepala Urusan Pemerintahan dan peneliti bertanya. Apa saja program dilaksanakan di dalam urusan pemerintahan? Informan mengatakan:

“Program-program yang kami selaku pemerintah kampung di sini jalankan yaitu bagaimana kami memajukan pembangunan kampung dalam hal ini jalan setapak antar kampung, saluran air yang ada di belakang rumah warga ,pagar, Talud yang ada dikedua sungai dan mensejahterakan masyarakat dalam hal ini kami akan memberikan bantuan ke masyarakat”.

Melihat juga program-program yang sudah di jalankan sangatlah penting maka peneliti terus melakukan wawancara dengan informan AB selaku Kaur Pembangunan ketika peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaannya dan hambatannya? Maka didapatkan jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya, untuk pelaksanaannya yaitu kami mengikuti prosedurnya dan sudah cukup baik tentang program-program di bidang pembangunan, tetapi yang menjadi hambatannya yaitu kami masih kekurangan dana untuk pembangunan dan ada beberapa staf kampung yang kurang hadir-hadir dan bekerja sesuai tugas yang diberikan kepada mereka sehingga ketika kami mau membicarakan program-program desa mereka pun tidak tahu”.

Selanjutnya, peneliti meminta tanggapan kepada AB selaku Kaur Pembangunan mengenai indikator peran pemerintah kampung dalam urusan pembangunan dan dengan pertanyaan, program apa yang bapak kerjakan sebagai pemerintah kampung

dalam urusan pembangunan? Jawaban yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Program-program yang sementara kami jalankan adalah, pembangunan pagar, talud dengan cara membuat jaring yang diisi batu-batuan sebagai bendungan air kali, dan jalan setapak penghubung antar kampung yang kami terus usaha”.

Diwaktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara kepada informan TB selaku kepala Kampung Aingongin dan peneliti menanyakan tentang Apakah dalam penyusunan program pembangunan kampung masyarakat selalu dilibatkan? Maka informan mengatakan:

“Yang kami tau sesuai aturan itu, kalau dalam penyusunan program pembangunan kampung, masyarakat kami tidak melibatkan karena bukan sama dengan yang dulu lagi sekarang kan paradigm pemerintahan sudah berubah jadi masyarakat itu tidak terlibat kecuali Badan Permusyawaratan Kampung itu terlibat karena merekalah wakil rakyat”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan menanyakan kepada informan AB selaku Kaur Pembangunan dan peneliti bertanya, Apakah warga masyarakat berkomitmen mendukung, melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan? Informan mengatakan:

“Yang setau kami masyarakat hanya sebagian saja yang berkomitmen dan mendukung pembangunan kampung yang ada, mungkin yang lain merasa kurang setuju dan kurang senang dengan program yang ada.

dan peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan SB dengan indikator meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dengan pertanyaan; bagaimana tanggungjawab bapak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan? Maka, SB menjawab:

“Sesuai dengan aturan kan sudah ada Bamuskam jadi, berkaitan kami mau tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sudah tidak ada lagi kecuali dalam pelaksanaan itu kami masih bisa melibatkan tetapi.

Bertolak dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan di atas yang berkaitan posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan maka peneliti melakukan pedalaman wawancara dengan melakukan *cross chek* kepada Bamuskam ketika kondisi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan informan AB selaku ketua Bamuskam dan informan menjawab:

“Kalau menurut saya masyarakat juga harus dilibatkan jangan Kepala Kampung dan stafnya berfikir karena ada kami sehingga, masyarakat juga tidak dilibatkan itu sebenarnya salah kalau begitu. Masyarakat kan harus berdayakan agar masyarakat juga senang dengan kita punya kerja dan program yang ada”.

#### **Wawancara Kepada Masyarakat**

Terlepas dari peran pemerintah kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan maka sangatlah dibutuhkan respon masyarakat terhadap peran pemerintah kampung dan peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada

dalam masyarakat maka, peneliti menanyakan kepada informan DD selaku masyarakat kampung Ainggogin dengan indikator respon masyarakat terhadap peran pemerintah kampung dan dengan pertanyaan, Apa penilaian bapak/ibu terhadap peran pemerintah kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan?

“Menurut saya sebagai masyarakat menilai tugas yang dijaankan oleh pemerintah kampung dan stafnya itu belum dikatakan baik dalam pola kerjanya karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan program pembangunan juga tidak diselesaikan sampai saat ini dan tidak kurang mendengar aspirasi kami sebagai masyarakat serta tidak mengerakan kami atau melibatkan kami di setiap rapat-rapat kerja”.

Terlepas dari wawancara di atas maka peneliti kembali melakukan wawancara kepada informan NS selaku masyarakat dan peneliti menanyakan tentang, Dalam bentuk apa bapak/ibu berpartisipasi terhadap penilaian dan pemeliharaan hasil pembangunan?

“Dalam bentuk pikiran dan tenaga dimana saat saya dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan kampung”.

**Pembahasan**  
**Peran pemerintah kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung di Kampung Ainggogin Kecamatan Tembapapura Kabupaten Mimika.**

Dari deskripsi data hasil penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung dan perangkatnya,

belum dikatakan baik dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan. Sehingga hal ini berimplikasi pada tingkat kepuasan dan harapan dari masyarakat serta penilaian masyarakat terhadap pemerintah kampung yang sangat rendah. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan di kampung Ainggogin dalam pemerataannya sangat tergantung dari peran pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung dan perangkatnya untuk memberdayakan masyarakat dan mengfungsikan semua elemen yang sangat professional dalam masyarakat bahkan pihak swasta. Salah satu cara pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada tahap evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat 1 dan 2, dengan tegas menjamin tugas dan wewenang pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung mengoptimalkan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung Ainggogin seutuhnya dan orientasi pembangunan dengan melalui pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membangun masyarakat Ainggogin, baik mental maupun spiritualnya.

Menurut Soemantri, 2011, menjelaskan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayaan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri, 2011: 7)

Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Wijaja, 2010 bahwa: "Kepela Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembantakan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antara desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi, pasar desa, dan urusan kemasyaran, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. (Wijaja, 2010: 76)

Selanjutnya juga Menurut Rogers dan Shoemaker, dalam Hanafi, 1986: 63-64 partisipasi adalah keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuat keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif. Ini berarti semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan." (Harun dan Adrunto, 2011: 249)

Mengacu pada hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori di atas, maka dapat dikatakan peran pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung dan perangkat lainnya, belum menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hal ini dilihat dari peran

pemerintah kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua tahap program pembangunan yang dimulai dari pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui MUSERNBANG Kampung sampai pada tahap evaluasi pembangunan. Kondisi masyarakat yang ada di kampung Aingogin seharusnya masyarakat bukan hanyalah sebagai objek penderita, karena apabila pembangunan bisa berjalan dengan baik maka harus dengan perencanaan yang berasal dari bawah ke atas dimana masyarakat juga diberdayakan agar peran masyarakat dalam pengambilan keputusan sampai pada evaluasi itu benar-benar tercipta dan sesuai yang diharapkan masyarakat. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuat keputusan sangat berhubungan positif dengan kepuasan mereka.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Zainal, 2008): "Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan."

Dari uraian di atas bahwa masyarakat diuntut untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan yang untuk memberikan kontribusi dalam musyawarah yang bermanfaat untuk program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Untuk itu pemerintah kampung diuntut agar mampu mengerakan anggota masyarakatnya untuk berkontribusi

dalam perencanaan suatu program pembangunan yang berakar pada masyarakat.

### **Respon Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah Kampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan.**

Kartasmita mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. (Krisnanto, 2007)

Dari hasil wawancara di atas, dan dikaitkan dengan teori yang ada maka tidak sesuai dengan teori karena dalam pembangunan kampung partisipasi dari masyarakat sangat terbatas ini karena masyarakat tidak diberi kesempatan untuk dapat menghadirkan diri dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sehingga berimplikasi pada penilaian masyarakat yang kurang baik terhadap pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung dan perangkatnya.

Demikian juga Menurut Cohen dan Uphoff 1977:8 Menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :

- 1). Pengambilan keputusan.
- 2). Implementasi
- 3). Pemanfaatan (*Benefits*)
- 4). Evaluasi Program

Pembangunan.

(Prayitno, 2008: 2)

Berkaitan dengan hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori maka peran pemerintah kampung Aingogin dalam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkesan kurang baik dari penilaian masyarakat

karena pemerintah kampung tidak memberdayakan masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan, implementasi dan sampai pada evaluasi program pembangunan. Padahal dilihat dari hak dan kewajiban dari masyarakat bahwa masyarakat juga terlibat dalam pengambilan keputusan, dan sampai menikmati pembangunan kampung yang ada.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan**

Mengacu pada hasil wawancara di atas, maka bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan masih sangat terbatas, dan sesuai dengan hasil yang didapatkan masyarakat hanya sebagai instrument pembangunan dimana partisipasi masyarakat hanya pada pelaksanaan pembangunan sedangkan dalam perencanaan penyusunan program partisipasi masyarakat sangat terbatas ini karena tidak ada perhatian penuh dari pemerintah kampung untuk mengerakan anggota masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk program pembangunan desa. Dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 dengan tegas mengatakan pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara masyawara, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia, menoptimalkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan hak dan kewajiban dari masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawara dan mufakat yang diambil.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Ndraha, 1987: 111 adalah sebagai berikut;

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dengan memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengabaikan, menerima, dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan penetapan rencana
4. Partisipasi dalam operasional pelaksanaan pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan (Mosh dan Matte, op. Cit; Cohen dan Uphoff, op. cit), yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas, maka dikaitkan dengan teori di atas maka didapatkan kesimpulan belum sesuai dengan teori karena partisipasi masyarakat yang diberikan hanya dalam bentuk tenaga sedangkan dalam bentuk pikiran, pendapat, dan sampai pemeliharaan dan mengembangkan hasil pembangunan masih sangat terbatas, ini karena peran pemerintah kampung yang masih sangat minim sehingga berimplikasi pada masyarakat yang

tidak menerima akan segala kebijakan dari pemerintah kampung.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Peran pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung dan perangkatnya dalam urusan pembangunan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Ainggogin belum dilakukan secara baik dan terencana dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan dan sampai pada tahap evaluasi atau pemeliharaan hasil pembangunan serta aspirasi dari masyarakat tidak diperhatikan dan diprioritaskan. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan maka, pemerintah kampung yang ada di kampung Ainggogin diharapkan mampu mempengaruhi masyarakatnya sehingga kedepan masyarakat dapat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan untuk berkontribusi dalam pembangunan kampung karena masyarakat juga mempunyai hak untuk memberikan tanggapan dan masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek penderita tetapi masyarakat juga mempunyai peran dalam pembangunan yang harus ditingkatkan dengan melalui pemberdayaan masyarakat.

### **Saran**

Pemerintah kampung sebagai penyelenggaraan pembangunan diharapkan agar dapat mengerahkan dan mengembangkan pembangunan baik fisik maupun non-fisik dan dalam pembangunan fisik diharapkan

pemerintah kampung Ainggogin dapat meningkatkan pembangunan sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Pembangunan non-fisik, diharapkan pemerintah kampung dapat menggerakkan masyarakatnya agar dapat berkontribusi dalam penyusunan program pembangunan dan sampai pemeliharaan hasil pembangunan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, diharapkan pemerintah kampung agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu tentang semua program pembangunan yang akan dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui program pembangunan yang dilaksanakan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diharapkan pemerintah kampung dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat agar masyarakat dan para tokoh juga menyadari bahwa pembangunan yang ada adalah tanggung jawab bersama serta dengan secara sadar dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kampung dan pemeliharaan hasil pembangunan kampung. Berkaitan dengan transparansi, diharapkan pemerintah kampung lebih terbuka tentang pengelolaan pendapatan asli kampung agar masyarakat dapat merasa puas dengan keberadaan PAK.

#### Daftar Pustaka

- Burhan, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi Ambarsari, 2002, *Kebijakan Publik Partisipasi Perempuan*, Tim Pattiro, Surakarta
- Fajlurrahman Jurdi, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana Jakarta
- Francisco Stepanus, 2015, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang*, Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015.
- Harun, H. Rochajat, dan Eluinero Adriunto, 2011, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perseptif Dominan Kajian Ulang Dan Teori Kritis*, Rajawali Pres, Jakarta
- Sambo Ferdy & Dahlan Faisal, 2016, *Diagram Undang-undang Pemilihan*, CV. Rabita Sawangan Depok
- Kaswan, 2019. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, Yarma Widya
- Kaho, J.R. 2002. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartasmit, Ginanjar, 2006. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka.
- Krisnanto, W.(2007), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. (Blogspot.<http://wahyukris.blogspot.com>, Di akses, 7 Juni 2022).
- Moleong, Ilexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas*, PT. Bina Angkasa Jakarta.
- Prayinto, Didi, 2008, *“Tesis Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan”* (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib

- Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Mix Metho*, PT Rajagrafindo Persada Kota Depok.
- Soemantri, B. Trisantono 2011, *Pedomam Penyelenggaraan pemerintahanDesa*, Fokusmedia Bandung.
- Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Warga*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Alfabeta
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yustisia Tim Visi, 2015, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Visimedia, Jakarta.